



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2026**

**Tentang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Wanggudu, 31 Desember 2025



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tahun anggaran 2026.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.056.810.038.235,00,- (Satu Triliun Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.716.640.665,00,- (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.350.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.020.000.000,00,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.546.640.665,00,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.800.000.000,00,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 939.324.721.600,00,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 894.418.514.000,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.906.207.600,00,- (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.768.675.970,00,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.301.587.103.630,00,- (Satu Triliun Tiga Ratus Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 786.525.189.166,64,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi; dan
 - e. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 506.283.035.094,92,- (Lima Ratus Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.182.695.714,04,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Empat Rupiah).

- d. Belanja subsidi; dan
 - e. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 506.283.035.094,92,- (Lima Ratus Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.182.695.714,04,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Empat Rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.065.454.115,68,- (Tujuh Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Belas Koma Enam Puluh Delapan).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.894.004.242,00,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 310.891.929.187,36,- (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.711.535.100,00,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.001.575.484,48,- (Dua Belas Milyar Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Koma Empat Puluh Empat).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.343.160.996,38,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 115.529.304.281,50,- (Seratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.732.683.325,00,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.573.670.000,00,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 189.169.985.276,00,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.252.628.776,00,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.917.356.500,00,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 373.668.481.395,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 309.222.773.395,00,- (Tiga Ratus Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas;

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 - b. Penerimaan pembiayaan utang daerah
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.222.773.395,00,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.445.708.000,00,- (Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00,- (Tiga Belas Milyar Rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.445.708.000,00,- (Lima Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -244.777.065.395,00,- (Minus Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 244.777.065.395,00,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2025



Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE UTARA,



RUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 149

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR (5 / 112 / 2025)

DAFTAR ISI

KODE	URAIAN	HALAMAN
1	2	3
	PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2026	
LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026	1 - 2
LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2026	3 - 18
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026	19 - 544
LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2026	545 - 1094
LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026	1095 - 1098
LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2026	1099 - 1105
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026	1106 - 1112
LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026	1113 - 1323
LAMPIRAN IX	SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026	1324
LAMPIRAN X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2026	1325
LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	1326



KABUPATEN KONAWE UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.716.640.665,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.350.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	48.020.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.546.640.665,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.800.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	939.324.721.600,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	894.418.514.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.906.207.600,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.768.675.970,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.768.675.970,00
	Jumlah Pendapatan	1.056.810.038.235,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	786.525.189.166,64
5.1.01	Belanja Pegawai	506.283.035.094,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.182.695.714,04
5.1.03	Belanja Bunga	7.065.454.115,68
5.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.894.004.242,00
5.2	BELANJA MODAL	310.891.929.187,36
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.711.535.100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.001.575.484,48
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.343.160.996,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.529.304.281,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.732.683.325,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.670.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	189.169.985.276,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.252.628.776,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.917.356.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.301.587.103.630,00
	Total Surplus/(Defisit)	-244.777.065.395,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	309.222.773.395,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.222.773.395,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	250.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.445.708.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	51.445.708.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	309.222.773.395,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	64.445.708.000,00
	Pembiayaan Netto	244.777.065.395,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Konawe Utara, 31 Desember 2025





KABUPATEN KONAHE UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	69.979.550.970,00	335.497.623.952,62	258.639.962.494,38	0,00	0,00	594.137.586.447,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	19.348.170.000,00	174.579.045.755,64	10.037.741.558,36	0,00	0,00	184.616.787.314,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.597.810.000,00	162.890.729.654,64	7.165.016.059,36	0,00	0,00	170.055.745.714,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	0,00	254.545.100,00	45.622.600,00	0,00	0,00	300.167.700,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD SD NEGERI 1 ANDOWIA	136.000.000,00	119.467.700,00	16.532.300,00	0,00	0,00	136.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD SD NEGERI 1 ASERA	95.000.000,00	82.800.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD SD NEGERI 1 LANDAWE	28.000.000,00	25.119.000,00	2.881.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0005	UPTD SD NEGERI 1 LANGGIKIMA	224.000.000,00	106.476.500,00	117.523.500,00	0,00	0,00	224.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0006	UPTD SD NEGERI 1 LASOLO	254.000.000,00	176.704.800,00	77.295.200,00	0,00	0,00	254.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0007	UPTD SD NEGERI 1 LASOLO KEPULAUAN	72.000.000,00	62.741.500,00	9.258.500,00	0,00	0,00	72.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0008	UPTD SD NEGERI 1 LEMBO	96.000.000,00	80.734.800,00	15.265.200,00	0,00	0,00	96.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0009	UPTD SD NEGERI 1 MOLAWA	122.000.000,00	91.300.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0010	UPTD SD NEGERI 1 MOTUI	159.000.000,00	128.914.400,00	30.085.600,00	0,00	0,00	159.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0011	UPTD SD NEGERI 1 OHEO	69.000.000,00	62.100.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0012	UPTD SD NEGERI 1 SAWA	82.000.000,00	55.586.100,00	26.413.900,00	0,00	0,00	82.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0013	UPTD SD NEGERI 1 WAWOLESEA	108.000.000,00	72.200.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0014	UPTD SD NEGERI 1 WIWIRANO	73.000.000,00	65.680.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0015	UPTD SD NEGERI 10 ASERA	43.000.000,00	35.951.900,00	7.048.100,00	0,00	0,00	43.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0016	UPTD SD NEGERI 10 WIWIRANO	56.000.000,00	47.715.000,00	8.285.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0017	UPTD SD NEGERI 11 ASERA	43.000.000,00	38.700.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0018	UPTD SD NEGERI 12 ASERA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0019	UPTD SD NEGERI 2 ANDOWIA	128.000.000,00	109.777.700,00	18.222.300,00	0,00	0,00	128.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0020	UPTD SD NEGERI 2 ASERA	47.000.000,00	37.744.200,00	9.255.800,00	0,00	0,00	47.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0021	UPTD SD NEGERI 2 LANDAWE	96.000.000,00	86.221.000,00	9.779.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0022	UPTD SD NEGERI 2 LANGGIKIMA	184.000.000,00	104.652.000,00	79.348.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0023	UPTD SD NEGERI 2 LASOLO	94.000.000,00	79.600.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0024	UPTD SD NEGERI 2 LASOLO KEPULAUAN	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0025	UPTD SD NEGERI 2 LEMBO	79.000.000,00	64.748.800,00	14.251.200,00	0,00	0,00	79.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0026	UPTD SD NEGERI 2 MOLAWA	189.000.000,00	160.378.000,00	28.622.000,00	0,00	0,00	189.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0027	UPTD SD NEGERI 2 MOTUI	132.000.000,00	84.919.300,00	47.080.700,00	0,00	0,00	132.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0028	UPTD SD NEGERI 2 OHEO	64.000.000,00	51.808.600,00	12.191.400,00	0,00	0,00	64.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0029	UPTD SD NEGERI 2 SAWA	122.000.000,00	81.976.500,00	40.023.500,00	0,00	0,00	122.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0030	UPTD SD NEGERI 2 WAWOLESEA	128.000.000,00	88.419.200,00	39.580.800,00	0,00	0,00	128.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0031	UPTD SD NEGERI 2 WIWIRANO	37.000.000,00	33.300.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0032	UPTD SD NEGERI 3 ANDOWIA	106.000.000,00	84.790.700,00	21.209.300,00	0,00	0,00	106.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0033	UPTD SD NEGERI 3 ASERA	26.000.000,00	19.745.100,00	6.254.900,00	0,00	0,00	26.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0034	UPTD SD NEGERI 3 LANDAWE	63.000.000,00	51.285.700,00	11.714.300,00	0,00	0,00	63.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0035	UPTD SD NEGERI 3 LANGGIKIMA	101.000.000,00	82.757.500,00	18.242.500,00	0,00	0,00	101.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0036	UPTD SD NEGERI 3 LASOLO	76.000.000,00	52.059.500,00	23.940.500,00	0,00	0,00	76.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0037	UPTD SD NEGERI 3 LASOLO KEPULAUAN	35.000.000,00	31.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0038	UPTD SD NEGERI 3 LEMBO	82.000.000,00	73.749.000,00	8.251.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0039	UPTD SD NEGERI 3 MOLAWA	118.000.000,00	81.700.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0040	UPTD SD NEGERI 3 MOTUI	63.000.000,00	56.086.100,00	6.913.900,00	0,00	0,00	63.000.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0041	UPTD SD NEGERI 3 OHEO	98.000.000,00	83.048.000,00	14.952.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0042	UPTD SD NEGERI 3 SAWA	120.000.000,00	80.850.400,00	39.149.600,00	0,00	0,00	120.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0043	UPTD SD NEGERI 3 WAWOLESEA	115.000.000,00	83.054.100,00	31.945.900,00	0,00	0,00	115.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0044	UPTD SD NEGERI 3 WIWIRANO	83.000.000,00	75.112.000,00	7.888.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0045	UPTD SD NEGERI 4 ANDOWIA	235.000.000,00	171.742.000,00	63.258.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0046	UPTD SD NEGERI 4 ASERA	114.000.000,00	92.901.600,00	21.098.400,00	0,00	0,00	114.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0047	UPTD SD NEGERI 4 LANDAWE	49.000.000,00	42.100.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0048	UPTD SD NEGERI 4 LANGGIKIMA	123.000.000,00	77.138.500,00	45.861.500,00	0,00	0,00	123.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0049	UPTD SD NEGERI 4 LASOLO	104.000.000,00	88.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	104.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0050	UPTD SD NEGERI 4 LASOLO KEPULAUAN	88.000.000,00	75.591.800,00	12.408.200,00	0,00	0,00	88.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0051	UPTD SD NEGERI 4 LEMBO	85.000.000,00	67.728.200,00	17.271.800,00	0,00	0,00	85.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0052	UPTD SD NEGERI 4 MOLAWE	118.000.000,00	99.909.000,00	18.091.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0053	UPTD SD NEGERI 4 MOTUI	98.000.000,00	76.687.700,00	21.312.300,00	0,00	0,00	98.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0054	UPTD SD NEGERI 4 OHEO	97.000.000,00	83.618.400,00	13.381.600,00	0,00	0,00	97.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0055	UPTD SD NEGERI 4 SAWA	45.000.000,00	24.048.500,00	20.951.500,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0056	UPTD SD NEGERI 4 WAWOLESEA	72.000.000,00	64.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0057	UPTD SD NEGERI 4 WIWIRANO	127.000.000,00	114.760.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0058	UPTD SD NEGERI 5 ANDOWIA	215.000.000,00	160.957.550,00	54.042.450,00	0,00	0,00	215.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0059	UPTD SD NEGERI 5 ASERA	348.000.000,00	243.868.400,00	104.131.600,00	0,00	0,00	348.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0060	UPTD SD NEGERI 5 LANDAWE	47.000.000,00	42.240.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0061	UPTD SD NEGERI 5 LANGGIKIMA	100.000.000,00	91.604.500,00	8.395.500,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0062	UPTD SD NEGERI 5 LASOLO	84.000.000,00	60.155.500,00	22.844.500,00	0,00	0,00	83.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0063	UPTD SD NEGERI 5 LASOLO KEPULAUAN	92.000.000,00	67.481.500,00	24.518.500,00	0,00	0,00	92.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0064	UPTD SD NEGERI 5 LEMBO	83.000.000,00	74.642.000,00	8.358.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0065	UPTD SD NEGERI 5 MOLAWE	106.000.000,00	87.650.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0066	UPTD SD NEGERI 5 MOTUI	70.000.000,00	44.680.300,00	25.319.700,00	0,00	0,00	70.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0067	UPTD SD NEGERI 5 OHEO	119.000.000,00	97.655.800,00	21.344.200,00	0,00	0,00	119.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0068	UPTD SD NEGERI 5 SAWA	112.000.000,00	77.461.800,00	34.538.200,00	0,00	0,00	112.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0069	UPTD SD NEGERI 5 WAWOLESEA	62.000.000,00	55.800.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0070	UPTD SD NEGERI 5 WIWIRANO	68.000.000,00	60.112.000,00	7.888.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0071	UPTD SD NEGERI 6 ANDOWIA	152.000.000,00	121.830.800,00	30.169.200,00	0,00	0,00	152.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0072	UPTD SD NEGERI 6 ASERA	164.000.000,00	140.421.650,00	23.578.350,00	0,00	0,00	164.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0073	UPTD SD NEGERI 6 LANDAWA	41.000.000,00	29.163.000,00	11.837.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0074	UPTD SD NEGERI 6 LANGGIKIMA	127.000.000,00	77.917.000,00	49.083.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0075	UPTD SD NEGERI 6 LASOLO	85.000.000,00	55.694.700,00	29.305.300,00	0,00	0,00	85.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0076	UPTD SD NEGERI 6 LASOLO KEPULAUAN	16.000.000,00	14.285.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0077	UPTD SD NEGERI 6 LEMBO	49.000.000,00	38.362.800,00	10.637.200,00	0,00	0,00	49.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0078	UPTD SD NEGERI 6 MOLAWE	95.000.000,00	85.375.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0079	UPTD SD NEGERI 6 MOTUI	158.000.000,00	114.706.600,00	43.293.400,00	0,00	0,00	158.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0080	UPTD SD NEGERI 6 OHEO	22.000.000,00	19.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0081	UPTD SD NEGERI 6 SAWA	56.000.000,00	50.288.000,00	5.712.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0082	UPTD SD NEGERI 6 WIWIRANO	104.000.000,00	61.639.911,00	42.360.089,00	0,00	0,00	104.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0083	UPTD SD NEGERI 7 ANDOWIA	46.000.000,00	41.174.000,00	4.826.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0084	UPTD SD NEGERI 7 ASERA	53.000.000,00	47.141.900,00	5.858.100,00	0,00	0,00	53.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0085	UPTD SD NEGERI 7 LANDAWA	39.000.000,00	33.120.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0086	UPTD SD NEGERI 7 LANGGIKIMA	63.000.000,00	51.345.000,00	11.655.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0087	UPTD SD NEGERI 7 LASOLO	100.000.000,00	79.550.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0088	UPTD SD NEGERI 7 LASOLO KEPULAUAN	21.000.000,00	18.846.600,00	2.159.000,00	0,00	0,00	21.005.600,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0089	UPTD SD NEGERI 7 LEMBO	23.000.000,00	20.700.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0090	UPTD SD NEGERI 7 MOLAWÉ	45.000.000,00	32.100.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0091	UPTD SD NEGERI 7 MOTUI	26.000.000,00	16.460.900,00	9.539.100,00	0,00	0,00	26.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0092	UPTD SD NEGERI 7 OHEO	71.000.000,00	63.920.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0093	UPTD SD NEGERI 7 SAWA	52.000.000,00	39.798.800,00	12.201.200,00	0,00	0,00	52.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0094	UPTD SD NEGERI 7 WIWIRANO	40.000.000,00	31.342.300,00	8.657.700,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0095	UPTD SD NEGERI 8 ANDOWIA	70.000.000,00	62.792.000,00	7.208.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0096	UPTD SD NEGERI 8 ASERA	120.000.000,00	46.800.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0097	UPTD SD NEGERI 8 LASOLO	94.000.000,00	69.100.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0098	UPTD SD NEGERI 8 LEMBO	43.000.000,00	38.685.000,00	4.315.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0099	UPTD SD NEGERI 8 MOLAWÉ	63.000.000,00	46.908.000,00	16.092.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0100	UPTD SD NEGERI 8 MOTUI	45.000.000,00	32.280.900,00	12.719.100,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0101	UPTD SD NEGERI 8 OHEO	28.000.000,00	20.048.000,00	7.952.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0102	UPTD SD NEGERI 8 WIWIRANO	32.000.000,00	28.600.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0103	UPTD SD NEGERI 9 ASERA	35.000.000,00	31.300.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0104	UPTD SD NEGERI 9 OHEO	20.000.000,00	14.848.000,00	5.152.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0105	UPTD SD NEGERI 9 WIWIRANO	180.000.000,00	161.600.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0107	UPTD SMP NEGERI 1 ANDOWIA	466.200.000,00	367.624.000,00	98.576.000,00	0,00	0,00	466.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0108	UPTD SMP NEGERI 1 ASERA	64.260.000,00	64.260.000,00	0,00	0,00	0,00	64.260.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0109	UPTD SMP NEGERI 1 LANDAWÉ	163.800.000,00	122.482.900,00	41.317.100,00	0,00	0,00	163.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0110	UPTD SMP NEGERI 1 LANGGIKIMA	165.060.000,00	134.698.800,00	30.361.200,00	0,00	0,00	165.060.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0111	UPTD SMP NEGERI 1 LASOLO	406.980.000,00	406.980.000,00	0,00	0,00	0,00	406.980.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0112	UPTD SMP NEGERI 1 LEMBO	268.380.000,00	233.722.400,00	34.657.600,00	0,00	0,00	268.380.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0113	UPTD SMP NEGERI 1 MOLAWÉ	282.240.000,00	225.516.000,00	56.724.000,00	0,00	0,00	282.240.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0114	UPTD SMP NEGERI 1 MOTUI	100.800.000,00	76.235.000,00	24.565.000,00	0,00	0,00	100.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0115	UPTD SMP NEGERI 1 OHEO	132.300.000,00	119.070.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	132.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0116	UPTD SMP NEGERI 1 SATAP ANDOWIA	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0117	UPTD SMP NEGERI 1 SAWA	202.860.000,00	136.675.400,00	66.184.600,00	0,00	0,00	202.860.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0118	UPTD SMP NEGERI 1 WAWOLESEA	83.160.000,00	64.844.000,00	18.316.000,00	0,00	0,00	83.160.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0119	UPTD SMP NEGERI 1 WIWIRANO	243.180.000,00	172.522.800,00	70.657.200,00	0,00	0,00	243.180.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0120	UPTD SMP NEGERI 2 ASERA	304.920.000,00	233.444.700,00	71.475.300,00	0,00	0,00	304.920.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0121	UPTD SMP NEGERI 2 LEMBO	97.020.000,00	87.325.000,00	9.695.000,00	0,00	0,00	97.020.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0122	UPTD SMP NEGERI 2 MOLAWE	84.420.000,00	53.628.000,00	30.792.000,00	0,00	0,00	84.420.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0123	UPTD SMP NEGERI 2 MOTUI	42.840.000,00	35.699.900,00	7.140.100,00	0,00	0,00	42.840.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0124	UPTD SMP NEGERI 2 OHEO	151.200.000,00	136.074.000,00	15.126.000,00	0,00	0,00	151.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0125	UPTD SMP NEGERI 3 ASERA	127.260.000,00	113.960.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	127.260.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0126	UPTD SMP NEGERI 3 WIWIRANO	40.320.000,00	32.377.700,00	7.942.300,00	0,00	0,00	40.320.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0127	UPTD SMP NEGERI SATAP 1 LASOLO KEPULAUAN	75.600.000,00	59.713.100,00	15.886.900,00	0,00	0,00	75.600.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0128	UPTD SMP NEGERI SATAP 2 LANGGIKIMA	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	0,00	0,00	47.880.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0129	UPTD SMP NEGERI SATAP 2 LASOLO KEPULAUAN	57.960.000,00	48.805.800,00	9.154.200,00	0,00	0,00	57.960.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0130	UPTD SMP NEGERI SATAP 3 LANGGIKIMA	124.740.000,00	76.447.000,00	48.293.000,00	0,00	0,00	124.740.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0131	UPTD SMP NEGERI SATAP 3 WIWIRANO	79.380.000,00	72.395.000,00	6.985.000,00	0,00	0,00	79.380.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0132	UPTD SMP NEGERI SATAP 4 LASOLO KEPULAUAN	47.880.000,00	38.092.000,00	9.788.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0133	UPTD SMP NEGERI SATAP 4 MOLAWE	49.140.000,00	41.476.000,00	7.664.000,00	0,00	0,00	49.140.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0134	UPTD SMP NEGERI SATAP 4 SAWA	21.420.000,00	15.427.950,00	5.992.050,00	0,00	0,00	21.420.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0135	UPTD SMP NEGERI SATAP 5 LANDAWE	23.940.000,00	21.712.100,00	2.227.900,00	0,00	0,00	23.940.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0136	UPTD SMP NEGERI SATAP 5 LASOLO KEPULAUAN	83.160.000,00	74.844.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	83.160.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0137	UPTD SMP NEGERI SATAP 6 MOTUI	90.720.000,00	72.562.700,00	18.157.300,00	0,00	0,00	90.720.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0138	UPTD SMP NEGERI SATAP 7 OHEO	34.020.000,00	30.575.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	34.020.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0139	UPTD SMP NEGERI SATAP 8 ASERA	75.600.000,00	60.099.700,00	15.500.300,00	0,00	0,00	75.600.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0140	UPTD SMP NEGERI SATAP AMOROME	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0141	UPTD SMPN SATAP 2 PADALERE UTAMA	25.200.000,00	22.652.000,00	2.548.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0142	UPTD TK NEGERI SAMATURU	0,00	21.961.300,00	0,00	0,00	0,00	21.961.300,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0143	UPTD TK NEGERI SATAP PUULEMO	0,00	14.641.300,00	0,00	0,00	0,00	14.641.300,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0144	UPTD TK NEGERI SATAP OTOLE	0,00	17.081.000,00	0,00	0,00	0,00	17.081.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0145	UPTD TK NEGERI PEMBINA MELATI MEKAR	0,00	14.032.000,00	0,00	0,00	0,00	14.032.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0146	UPTD TK NEGERI NUR FAJAR	0,00	14.640.800,00	0,00	0,00	0,00	14.640.800,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0147	UPTD TK NEGERI SATAP LASOLO	0,00	15.861.400,00	0,00	0,00	0,00	15.861.400,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0148	UPTD TK NEGERI SATAP MANDIODO	0,00	20.130.800,00	0,00	0,00	0,00	20.130.800,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0149	UPTD TK NEGERI SATAP BANDAEHA	0,00	16.470.800,00	0,00	0,00	0,00	16.470.800,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0150	UPTD TK NEGERI OHEO	0,00	19.520.100,00	0,00	0,00	0,00	19.520.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0151	UPTD TK NEGERI PEMBINA	0,00	20.131.200,00	0,00	0,00	0,00	20.131.200,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0152	UPTD TK NEGERI KONASARA	0,00	26.841.000,00	0,00	0,00	0,00	26.841.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0153	UPTD TK NEGERI PANTAI INDAH	0,00	18.300.400,00	0,00	0,00	0,00	18.300.400,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0154	UPTD TK NEGERI ANAWAI	0,00	34.160.900,00	0,00	0,00	0,00	34.160.900,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0155	UPTD TK NEGERI HARAPAN BUNDA	0,00	36.600.200,00	0,00	0,00	0,00	36.600.200,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0156	UPTD TK NEGERI LANGGIKIMA	0,00	35.380.400,00	0,00	0,00	0,00	35.380.400,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0157	UPTD TK NEGERI MOROMBO PANTAI	0,00	8.541.700,00	0,00	0,00	0,00	8.541.700,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0158	UPTD TK NEGERI ASMA JAYA	0,00	12.811.000,00	0,00	0,00	0,00	12.811.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0159	UPTD TK NEGERI AL AMIN	0,00	4.271.900,00	0,00	0,00	0,00	4.271.900,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0160	UPTD TK NEGERI WULELE SANGGULA	0,00	20.740.900,00	0,00	0,00	0,00	20.740.900,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0161	UPTD TK NEGERI WISATA TANJUNG TAIPA	0,00	14.640.100,00	0,00	0,00	0,00	14.640.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0162	UPTD TK NEGERI MOWUNDO JAYA	0,00	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0163	UPTD TK NEGERI MORINI	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0164	UPTD TK NEGERI NUSA INDAH	0,00	14.558.400,00	0,00	0,00	0,00	14.558.400,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0165	UPTD TK NEGERI BAHARI MANDIRI	0,00	18.910.000,00	0,00	0,00	0,00	18.910.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0166	UPTD TK NEGERI INSANI TAQWA	0,00	18.300.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300.300,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0167	UPTD TK NEGERI SATAP BENDE	0,00	10.370.100,00	0,00	0,00	0,00	10.370.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0168	UPTD TK NEGERI MEKAR SARI	0,00	22.570.000,00	0,00	0,00	0,00	22.570.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0169	UPTD TK NEGERI BUNGA BANGSA	0,00	10.370.000,00	0,00	0,00	0,00	10.370.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0170	UPTD TK NEGERI BUNGA TANJUNG	0,00	16.470.100,00	0,00	0,00	0,00	16.470.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0171	UPTD TK NEGERI ANA MOKOLE	0,00	14.030.000,00	0,00	0,00	0,00	14.030.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0172	UPTD TK NEGERI NURUL HIDAYAH	0,00	10.370.100,00	0,00	0,00	0,00	10.370.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0173	UPTD TK NEGERI MASPUL WIWIRANO	0,00	31.720.100,00	0,00	0,00	0,00	31.720.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0174	UPTD SMP ISLAM BAHRUL HIKMAH	69.300.000,00	56.963.740,00	12.336.260,00	0,00	0,00	69.300.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	41.631.380.970,00	130.172.412.834,98	7.606.719.117,02	0,00	0,00	137.779.131.952,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.400.000.000,00	68.777.490.396,98	6.326.774.965,02	0,00	0,00	75.104.265.362,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD PUSKESMAS LANGGIKIMA	1.025.057.026,00	1.005.294.990,00	9.672.800,00	0,00	0,00	1.014.967.790,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD PUSKESMAS LEMBO	1.311.975.580,00	1.278.945.200,00	33.182.200,00	0,00	0,00	1.312.127.400,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD PUSKESMAS MATANDAH	1.049.275.302,00	1.025.043.350,00	15.758.900,00	0,00	0,00	1.040.802.250,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD PUSKESMAS WAWOLESEA	1.268.315.038,00	1.243.577.200,00	22.816.900,00	0,00	0,00	1.266.394.100,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD PUSKESMAS HIALU	1.470.263.097,00	1.449.624.600,0 0	23.727.000,00	0,00	0,00	1.473.351.600,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD PUSKESMAS SAWA	1.175.880.110,00	1.130.685.888,0 0	30.086.500,00	0,00	0,00	1.160.772.388,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD PUSKESMAS LASOLO	1.629.057.500,00	1.553.409.200,0 0	44.204.900,00	0,00	0,00	1.597.614.100,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD PUSKESMAS LAMPARINGA	993.762.132,00	975.614.100,00	7.873.800,00	0,00	0,00	983.487.900,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD PUSKESMAS OHEO	972.475.883,00	919.536.028,00	21.957.900,00	0,00	0,00	941.493.928,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD PUSKESMAS LANGGIKIMA PESISIR	1.089.976.418,00	1.083.470.000,0 0	6.485.400,00	0,00	0,00	1.089.955.400,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD PUSKESMAS PAKA INDAH	894.075.220,00	873.177.778,00	3.750.600,00	0,00	0,00	876.928.378,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD PUSKESMAS MOTUI	1.346.687.470,00	1.298.510.358,0 0	46.960.780,00	0,00	0,00	1.345.471.138,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD PUSKESMAS LANDAWE	1.066.370.950,00	1.050.175.260,0 0	16.449.500,00	0,00	0,00	1.066.624.760,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	UPTD PUSKESMAS ASERA	1.166.982.990,00	1.144.233.650,0 0	23.574.600,00	0,00	0,00	1.167.808.250,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	UPTD PUSKESMAS LASOLO KEPULAUAN	823.509.895,00	812.737.308,00	6.000.000,00	0,00	0,00	818.737.308,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	UPTD PUSKESMAS WANGGUDU RAYA	1.344.246.495,00	1.293.500.269,0 0	50.532.300,00	0,00	0,00	1.344.032.569,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	UPTD PUSKESMAS LARONANGA PANTAI	960.412.940,00	943.185.980,00	12.764.600,00	0,00	0,00	955.950.580,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	UPTD PUSKESMAS ANDEO	962.658.018,00	881.776.045,00	15.009.200,00	0,00	0,00	896.785.245,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	UPTD PUSKESMAS MOLAWA	1.448.007.150,00	1.374.907.600,0 0	28.214.000,00	0,00	0,00	1.403.121.600,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	UPTD PUSKESMAS TAPUNGGAYA	1.109.718.310,00	1.101.906.293,0 0	8.471.400,00	0,00	0,00	1.110.377.693,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	UPTD PUSKESMAS ANDOWIA	1.335.919.538,00	1.325.914.660,0 0	9.122.100,00	0,00	0,00	1.335.036.760,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	UPTD PUSKESMAS TETEWATU	786.753.908,00	773.407.500,00	12.280.200,00	0,00	0,00	785.687.700,00
1	02	1.02.0.00.0.00.99.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	15.000.000.000,00	36.856.289.181,0 00	831.048.572,00	0,00	0,00	37.687.337.753,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.000.000.000,00	14.935.094.254,00	237.329.111.700,00	0,00	0,00	252.264.205.954,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.000.000.000,00	14.935.094.254,00	237.329.111.700,00	0,00	0,00	252.264.205.954,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.709.250.249,00	818.558.025,00	0,00	0,00	3.527.808.274,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.709.250.249,00	818.558.025,00	0,00	0,00	3.527.808.274,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	9.088.038.054,00	2.838.709.094,00	0,00	0,00	11.926.747.148,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	2.400.277.637,00	648.094,00	0,00	0,00	2.400.925.731,00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	2.410.514.287,00	661.000,00	0,00	0,00	2.411.175.287,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	4.277.246.130,00	2.837.400.000,00	0,00	0,00	7.114.646.130,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	4.013.782.805,00	9.123.000,00	0,00	0,00	4.022.905.805,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0,00	4.013.782.805,00	9.123.000,00	0,00	0,00	4.022.905.805,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.400.000.000,00	43.097.268.305,00	37.020.957.100,00	0,00	0,00	80.118.225.405,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	2.961.801.003,00	0,00	0,00	0,00	2.961.801.003,00
2	07	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	0,00	2.931.360.703,00	0,00	0,00	0,00	2.931.360.703,00
2	07	3.32.2.07.0.00.02.0001	UPT BALAI LATIHAN KERJA	0,00	30.440.300,00	0,00	0,00	0,00	30.440.300,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	3.415.595.800,00	0,00	0,00	0,00	3.415.595.800,00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.861.476.800,00	0,00	0,00	0,00	2.861.476.800,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0001	UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	554.119.000,00	0,00	0,00	0,00	554.119.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	2.467.613.145,00	29.609.700,00	0,00	0,00	2.497.222.845,00
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	2.467.613.145,00	29.609.700,00	0,00	0,00	2.497.222.845,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	567.919.500,00	6.833.047.100,00	0,00	0,00	7.400.966.600,00
2	10	4.01.2.10.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	567.919.500,00	6.833.047.100,00	0,00	0,00	7.400.966.600,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	4.225.799.053,00	28.808.500.000,00	0,00	0,00	33.034.299.053,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	4.225.799.053,00	28.808.500.000,00	0,00	0,00	33.034.299.053,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.059.580.053,00	134.000.000,00	0,00	0,00	2.193.580.053,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.059.580.053,00	134.000.000,00	0,00	0,00	2.193.580.053,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	3.321.540.719,00	0,00	0,00	0,00	3.321.540.719,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	3.321.540.719,00	0,00	0,00	0,00	3.321.540.719,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	6.319.790.984,00	0,00	0,00	0,00	6.319.790.984,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	6.319.790.984,00	0,00	0,00	0,00	6.319.790.984,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.400.000.000,00	2.828.061.145,00	0,00	0,00	0,00	2.828.061.145,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	37.400.000.000,00	2.828.061.145,00	0,00	0,00	0,00	2.828.061.145,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.600.924.555,00	15.037.200,00	0,00	0,00	3.615.961.755,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	16	2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.600.924.555,0 0	15.037.200,00	0,00	0,00	3.615.961.755,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	3.206.694.670,0 0	3.254.900,00	0,00	0,00	3.209.949.570,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	3.206.694.670,0 0	3.254.900,00	0,00	0,00	3.209.949.570,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	1.968.089.112,0 0	0,00	0,00	0,00	1.968.089.112,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	0,00	1.968.089.112,0 0	0,00	0,00	0,00	1.968.089.112,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	3.873.054.874,0 0	1.197.508.200,0 0	0,00	0,00	5.070.563.074,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	3.873.054.874,0 0	1.197.508.200,0 0	0,00	0,00	5.070.563.074,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	224.050.500,00	0,00	0,00	0,00	224.050.500,00
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	224.050.500,00	0,00	0,00	0,00	224.050.500,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	251.249.250,00	0,00	0,00	0,00	251.249.250,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	251.249.250,00	0,00	0,00	0,00	251.249.250,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	1.784.045.342,0 0	0,00	0,00	0,00	1.784.045.342,00
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	1.784.045.342,0 0	0,00	0,00	0,00	1.784.045.342,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	21.458.600,00	0,00	0,00	0,00	21.458.600,00
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0,00	21.458.600,00	0,00	0,00	0,00	21.458.600,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.620.000.000,00	52.342.941.603,0 00	1.656.978.900,0 0	0,00	0,00	53.999.920.503,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.767.703.982,0 0	0,00	0,00	0,00	5.767.703.982,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	0,00	5.767.703.982,0 0	0,00	0,00	0,00	5.767.703.982,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	650.000.000,00	3.894.872.843,00	0,00	0,00	0,00	3.894.872.843,00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	650.000.000,00	3.894.872.843,00	0,00	0,00	0,00	3.894.872.843,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	40.068.197.413,00	1.656.978.900,00	0,00	0,00	41.725.176.313,00
3	27	3.27.0.00.0.00.06.0000	DINAS PERKEBUNAN	0,00	12.956.220.952,00	0,00	0,00	0,00	12.956.220.952,00
3	27	3.27.0.00.0.00.07.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	0,00	27.104.318.461,00	1.656.978.900,00	0,00	0,00	28.761.297.361,00
3	27	3.27.0.00.0.00.07.0001	UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	0,00	7.658.000,00	0,00	0,00	0,00	7.658.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	2.527.193.365,00	0,00	0,00	0,00	2.527.193.365,00
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	2.527.193.365,00	0,00	0,00	0,00	2.527.193.365,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	470.000.000,00	45.586.000,00	0,00	0,00	0,00	45.586.000,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	470.000.000,00	45.586.000,00	0,00	0,00	0,00	45.586.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	500.000.000,00	39.388.000,00	0,00	0,00	0,00	39.388.000,00
3	32	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	500.000.000,00	39.388.000,00	0,00	0,00	0,00	39.388.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	111.243.329.172,52	10.053.344.946,48	0,00	0,00	121.296.674.119,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	88.677.439.571,52	10.053.344.946,48	0,00	0,00	98.730.784.518,00
4	01	4.01.2.10.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	88.677.439.571,52	10.053.344.946,48	0,00	0,00	98.730.784.518,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	22.565.889.601,00	0,00	0,00	0,00	22.565.889.601,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0,00	22.565.889.601,00	0,00	0,00	0,00	22.565.889.601,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	942.810.487.265,0 0	216.123.685.614 ,00	1.302.000.800,0 0	15.000.000.000 ,00	189.169.985.276 ,00	421.595.671.690,0 0
5	01		PERENCANAAN	0,00	6.629.245.107,0 0	336.112.500,00	0,00	0,00	6.965.357.607,00
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	6.629.245.107,0 0	336.112.500,00	0,00	0,00	6.965.357.607,00
5	02		KEUANGAN	942.810.487.265,0 0	205.446.183.005 ,00	936.180.000,00	15.000.000.000 ,00	189.169.985.276 ,00	410.552.348.281,0 0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	917.460.487.265,0 0	202.760.286.373 ,00	931.028.000,00	15.000.000.000 ,00	189.169.985.276 ,00	407.861.299.649,0 0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.350.000.000,00	2.685.896.632,0 0	5.152.000,00	0,00	0,00	2.691.048.632,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	3.706.286.902,0 0	29.708.300,00	0,00	0,00	3.735.995.202,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	3.706.286.902,0 0	29.708.300,00	0,00	0,00	3.735.995.202,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	35.762.900,00	0,00	0,00	0,00	35.762.900,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	35.762.900,00	0,00	0,00	0,00	35.762.900,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	306.207.700,00	0,00	0,00	0,00	306.207.700,00
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	306.207.700,00	0,00	0,00	0,00	306.207.700,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.000.000.000,00	4.000.145.628,0 0	0,00	0,00	0,00	4.000.145.628,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	5.000.000.000,00	4.000.145.628,0 0	0,00	0,00	0,00	4.000.145.628,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	5.000.000.000,00	4.000.145.628,0 0	0,00	0,00	0,00	4.000.145.628,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	21.095.806.380, 50	2.208.623.746,5 0	0,00	0,00	23.304.430.127,00
7	01		KECAMATAN	0,00	21.095.806.380, 50	2.208.623.746,5 0	0,00	0,00	23.304.430.127,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SAWA	0,00	1.435.452.389,0 0	0,00	0,00	0,00	1.435.452.389,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN SAWA	0,00	199.999.700,00	199.922.380,00	0,00	0,00	399.922.080,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LASOLO	0,00	1.921.308.349,0 0	0,00	0,00	0,00	1.921.308.349,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN TINOBUI	0,00	198.060.700,00	200.916.030,00	0,00	0,00	398.976.730,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN ASERA	0,00	2.060.253.934,0 0	0,00	0,00	0,00	2.060.253.934,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN WANGGUDU	0,00	199.971.670,50	200.028.368,00	0,00	0,00	400.000.038,50
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0002	KELURAHAN ASERA	0,00	199.899.996,00	200.100.004,50	0,00	0,00	400.000.000,50
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN WIWIRANO	0,00	2.053.908.235,0 0	0,00	0,00	0,00	2.053.908.235,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN LAMONAE	0,00	209.999.999,00	200.000.000,00	0,00	0,00	409.999.999,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN MOLAWA	0,00	1.681.567.105,0 0	0,00	0,00	0,00	1.681.567.105,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN MOLAWA	0,00	200.954.600,00	199.587.272,00	0,00	0,00	400.541.872,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN LEMBO	0,00	1.518.772.506,0 0	0,00	0,00	0,00	1.518.772.506,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN LEMBO	0,00	199.981.600,00	199.966.692,00	0,00	0,00	399.948.292,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN LANGGIKIMA	0,00	1.060.139.194,0 0	0,00	0,00	0,00	1.060.139.194,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0001	KELURAHAN LANGGIKIMA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN OHEO	0,00	1.195.823.413,0 0	0,00	0,00	0,00	1.195.823.413,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0001	KELURAHAN LINOMOIYO	0,00	200.003.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	400.003.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN ANDOWIA	0,00	1.903.599.466,0 0	0,00	0,00	0,00	1.903.599.466,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0001	KELURAHAN ANDOWIA	0,00	200.000.723,00	200.000.000,00	0,00	0,00	400.000.723,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN MOTUI	0,00	1.231.546.948,0 0	0,00	0,00	0,00	1.231.546.948,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0001	KELURAHAN BENDE	0,00	209.982.193,00	200.018.000,00	0,00	0,00	410.000.193,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN WAWOLESEA	0,00	951.405.298,00	8.085.000,00	0,00	0,00	959.490.298,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	0,00	781.369.493,00	0,00	0,00	0,00	781.369.493,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN LANDAWE	0,00	1.081.805.869,00	0,00	0,00	0,00	1.081.805.869,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	3.124.388.511,00	10.061.200,00	0,00	0,00	3.134.449.711,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	3.124.388.511,00	10.061.200,00	0,00	0,00	3.134.449.711,00
8	01	8.01.0.00.0.00.07.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	3.124.388.511,00	10.061.200,00	0,00	0,00	3.134.449.711,00
			TOTAL	1.056.810.038.235,00	786.525.189.166,64	310.891.929.187,36	15.000.000.000,00	189.169.985.276,00	1.301.587.103.630,00

Kab. Konawe Utara, 31 Desember 2025

